

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Keberadaan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan proses sejarah panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki sistem sesuai perkembangan pada zamannya. Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dan Undang-undang No 28 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.

Dengan diimplementasikannya Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 maka terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat sentralistis menjadi desentralistis yang memberikan kewenangan Kepada Pemerintah Daerah untuk mengeksplorasi, mengelola dan mengembangkan potensi daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga kemandirian Pemerintah Daerah merupakan suatu Keharusan. Untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tersebut sangat diperlukan partisipasi aktif dengan mengalang solidaritas warga daerah, legislatif dan eksekutif, perasaan ikut membangun dan menikmati hasil dan akhirnya memiliki kebanggaan dan kesetiaan kepada daerahnya.

Perubahan paradigma anggaran daerah yang dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Kaihatu,2006:3). Dalam menghadapi akuntabilitas, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan (Herawaty, 2011: 31). Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Ulum MD, 2004: 109), sehingga anggaran tersebut mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode yang akan datang. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Prestasi kerja tersebut tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang

telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Pusdiklatwas BPKP, 2011:2).

Seluruh instansi Pemerintah wajib memahami lingkup akuntabilitasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi. Sebagai asas umum, akuntabilitas penyelenggaraan Negara menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi Negara.

Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi (Ramandei, 2009: 2), sedangkan kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solihin, 2011: 9).

Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (UU 17/2003 tentang Keuangan Negara). Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Kusumaningrum (2010), mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh kusumaningrum (2010) meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian/ kepala sub seksi pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 108 orang. Analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Anjarwati (2012) dimana Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 51 SKPD diwilayah Tegal dan Pemalang. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya Penelitian nurini,indudewi (2010) menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Kabupaten Brebes. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan

tingkat signifikansi dibawah 0,05. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terbukti secara statistik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Adanya performance gap dalam LAKIP ternyata lebih disebabkan pada faktor eksternal diluar instansi pemerintah.

Penelitian suwandi,A.P. (2013) pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD pemerintah kota Padang). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.berikutnya

Penelitian zirman,et al (2010) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilakukan pada 47 Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Kerja menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Harsanti (2008) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Putri (2009) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah atas akuntabilitas kinerja, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan tidak menunjukkan adanya pengaruh.

Apriadi (2010) dan Nasution (2013) menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Harini Susilowati (2014) menyatakan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sedangkan tiga variabel lain yang diteliti yaitu variabel pengendalian akuntansi , variabel sistem pelaporan, variabel motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah surakarta.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Harini Susilowati (2014) yaitu pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Surakarta dengan mengurangi satu variabel yaitu motivasi kinerja. Peneliti memilih untuk menggantikan objek penelitian yaitu di kabupaten Musi Banyuasin dan di tiga OPD yaitu OPD Pendidikan dan Kebudayaan, OPD Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dan Sekretariat DPRD, dengan alasan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Pada OPD Pendidikan dan Kebudayaan, OPD Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dan Sekretariat DPRD)”**.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan di Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial di Kabupaten Musi Banyuasin?

1.3 BATASAN PEMBAHASAN

Agar pembahasan lebih terfokus maka dalam laporan ini peneliti membahas mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara simultan dan parsial di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1.4.1 Tujuan Penulisan

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara parsial di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara simultan di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja instansi-instansi serta memahami pentingnya akuntabilitas kinerja.
2. Sebagai referensi pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori dan literatur- literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kerangka pikir, penelitian sebelumnya serta hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang sampel yang digunakan dalam penelitian dan informasi data-data yang diperlukan dalam melakukan pengujian penelitian meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 22 sebagai alat bantu dalam pengolahan data. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Pada bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan sebagai penyelesaian dari permasalahan yang ada dalam perusahaan dan dari kesimpulan yang didapat, penulis akan berusaha memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah.